

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **2.1.Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

###### **2.1.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah**

Laporan keuangan sektor publik adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan (ArmelGustika R, 2017).

Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Selain menyediakan informasi untuk para pengguna laporan keuangan, laporan keuangan juga merupakan alat atau media bagi sebuah entitas didalam pemerintahan untuk

mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Armel Gustika R, 2017).

Dari beberapa referensi diatas peneliti menyimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintahan merupakan bentuk informasi keuangan yang ada didalam instansi pemerintah yang menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, dan arus kas suatu entitas yang digunakan untuk untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

#### **2.1.1.2 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu :

1. Masyarakat
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
4. Pemerintah

#### **2.1.1.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah

berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan Negara, oleh karena itu komponen yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan. PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual dimana pengakuan didasarkan pada munculnya hak dan kewajiban, bukan hanya berdasarkan arus kas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah meliputi :

1. Laporan pelaksanaan anggaran
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyediakan informasi anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi mengenai sumber,

alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi dan juga menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

2. Pelaporan Finansial

a. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

b. Laporan Operasional (LO)

LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan

yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas juga menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan atas nilai suatu pos yang disajikan

dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam SaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya. CaLK bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

#### **2.1.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Kualitas laporan keuangan harusnya dapat dipahami serta disajikan dalam bentuk dan istilah yang mudah dipahami oleh pemakai, sehingga pemakai dapat memahami bagaimana proses akuntansi serta dapat memahami istilah – istilah yang terdapat pada laporan keuangan. Suatu informasi dapat dikatakan relevan apabila informasi tersebut tepat waktu, serta dapat dikatakan andal apabila terbatas dari kesalahan. Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara lengkap (Wilfa, 2016).

Sulistyowati I (2017) laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah akan digunakan oleh beberapa pihak yang

berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pemerintah harus berupaya menyajikan informasi keuangan yang akurat dan bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya kriteria/persyaratan laporan keuangan yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan para pemakai laporan keuangan.

Dari referensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan agar informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai laporan keuangan untuk dasar pengambilan keputusan.

Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, adapun empat karakteristik persyaratan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa

depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu

2. Andal

Penggunaan informasi tersebut dapat dicegah Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi



yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

#### **2.1.1.5 Indikator Kualitas Laporan Keuangan**

Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, antara lain sebagai berikut (Pangestu Eka M, 2019):

##### 1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu

## 2) Andal

Penggunaan informasi tersebut dapat dicegah Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Penyajian jujur, Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.
- c. Netralitas Informasi, diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

## 3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### 4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## **2.1.2 Kualitas Sumber Daya Manusia**

### **2.1.2.1 Pengertian Sumber daya Manusia**

Kasanudin M (2011) Sumber daya manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi.

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya (Marnis dan Priyono, 2016).

Dari referensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia adalah manusia yang ada didalam sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki tugas sebagai prnggerak, pemikir, dn perencana untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

### **2.1.2.2 Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan,

dan pengalaman yang cukup memadai (Putri rumiadi dkk, 2015).

Kasanudin M (2011) Sumber daya manusia jika ditinjau dari segi kualitasnya memiliki dua kemampuan, yaitu :

1. Hard skill : Kemampuan akademik yang dimiliki seseorang, dan merupakan kemampuan spesifik yang harus dimiliki untuk sebuah pekerjaan tertentu.
2. Soft skill : Kemampuan menyesuaikan dengan lingkungan terutama dalam dunia kerja / organisasi, soft skill merupakan sifat bawaan dan tidak dipelajari secara formal.

Kedua kemampuan diatas diperlukan bagi sumber daya manusia dalam menggerakkan dan mengembangkan organisasi. Agar kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan memenuhi standar maka setiap tahapan proses harus direncanakan dan dikendalikan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi.

### **2.1.2.3 Pengukuran Kualitas Sumber Daya Manusia**

Menurut Kasanudin M (2011) Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dengan menggunakan teori sebagai berikut:

1. Produktivitas

Produktivitas didefinisikan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baik sumber daya yang diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal.

Untuk mencapai produktivitas kerja yang maksimum, organisasi harus menjamin dipilihnya orang yang tepat dengan pekerjaan yang tepat serta kondisi yang memungkinkan mereka bekerja optimal. Produktivitas dapat diartikan sebagai hasil pengukuran suatu kinerja dengan memperhitungkan sumber daya yang digunakan, termasuk sumber daya manusia.

Produktivitas dapat diukur pada tingkat individual, kelompok maupun organisasi. produktivitas juga mencerminkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai efektifitas dan efisiensi kinerja dalam kaitannya dengan penggunaannya sumber daya. Orang sebagai sumber daya manusia ditempat kerja termasuk sumber daya yang sangat penting dan perlu diperhitungkan.

Berikut ciri-ciri pegawai yang produktif adalah sebagai berikut :

- a. Cerdas dan dapat belajar dengan relatif cepat
- b. Kompeten dan professional
- c. Kreatif dan inovatif
- d. Memahami pekerjaan

- e. Belajar dengan cerdas menggunakan logika, efisien, tidak mudah macet dalam bekerja
- f. Selalu mencari perbaikan-perbaikan
- g. Dianggap bernilai oleh atasannya
- h. Memiliki catatan prestasi yang baik
- i. Selalu meningkatkan diri

## 2. Sikap dan perilaku

### a. Sikap

Sikap yang perlu dipupuk dan dikembangkan dalam merencanakan masa depan yang diinginkan itu ialah sikap yang antisipatif dan proaktif. Sikap demikian berarti banyak hal, antara lain :

1) Mengenal berbagai hal yang berpengaruh terhadap organisasi yang sekarang dominan dampaknya terhadap organisasi dan memperhitungkan sifat dampak tersebut dimasa depan.

2) Mampu mengidentifikasi perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi dan menganalisis apakah perkembangan itu bersifat sementara atau langgeng.

3) Mampu melihat kecenderungan-kecenderungan yang timbul dan mengkaitkan kecenderungan-

kecenderungan itu dengan sasaran-sasaran yang diinginkan.

- 4) Tidak sekedar memberikan reaksi terhadap situasi problematik yang timbul, akan tetapi mampu memperhitungkan sebelumnya.
- 5) Mampu berpikir dan bertindak proaktif.

b. Perilaku

Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan dengan kata lain, perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Melalui tindakan dan belajar, seseorang akan mendapatkan kepercayaan dan sikap terhadap sesuatu yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya.

3. Komunikasi

Komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara manusia dan mesin. Komunikasi dalam organisasi dapat dilihat dari sisi komunikasi antar pribadi dan komunikasi organisasi. komunikasi dapat terjadi karena adanya komponen-komponen, yaitu komunikator yang mengirimkan pesan yang diekspresikan melalui berbagai lambing dalam bentuk



bahasa. Selanjutnya pesan disampaikan melalui perantara yaitu media komunikasi. Pesan diterima oleh penerima yang selanjutnya pesan tersebut ditafsirkan.

Teknik berkomunikasi secara efektif, antara lain adalah :

- a. Setiap orang dalam organisasi harus mengetahui semua saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi.
- b. Mengetahui saluran komunikasi yang terbuka baginya dan bagaimana tata cara penggunaannya.
- c. Garis komunikasi sesingkat mungkin guna menghindari distorsi dalam proses komunikasi
- d. Harus terdapat kemungkinan untuk menggunakan semua jalur formal dengan mengindahkan hirarki organisasi yang berlaku
- e. Garis komunikasi hendaknya diusahakan agar tidak terganggu meskipun berbagai kegiatan berlangsung dalam organisasi yang bersangkutan
- f. Otentitas komunikasi hendaknya terjamin
- g. Orang yang bertindak sebagai pusat komunikasi hendaknya terdiri dari orang yang terampil.

#### 4. Hubungan

Berhubungan berarti membuka peluang dan sekaligus mengikat simpul-simpul informasi dan menggerakkan kehidupan. Manusia yang tidak atau

enggannya ber hubungan untuk membuka cakrawala pergaulan sosialnya atau menutup diri dan asyik dengan dirinya sendiri, pada dasarnya ia sedang mengubur masa depannya. Hal tersebut sama juga dalam suatu organisasi, bahwa hubungan dalam organisasi banyak terkait dengan rentang kendali yang diperlukan organisasi karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki manusia yang dalam hal ini adalah atasan. Rentang kendali adalah jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh atasan. Rentang kendali seseorang pemimpin jumlahnya relatif, akan tetapi beberapa buku menyatakan bahwa tidak lebih dari 10 orang, tergantung pada faktor-faktor berikut ini :

- a. Sifat dan rincinya rencana-rencana kerja
- b. Latihan-latihan dalam perusahaan
- c. Posisi pemimpin dalam struktur organisasi
- d. Dinamis atau statisnya organisasi
- e. Kemampuan dan handalnya alat komunikasi
- f. Tipe pekerjaan yang dilakukan
- g. Kecakapan dan pengalaman manajer
- h. Tingkat kewibawaan dan energy manajer
- i. Dedikasi dan partisipasi bawahan.

#### 2.1.2.4 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Pangestu Eka M (2019) kualitas sumber daya manusia dapat diukur dengan beberapa indikator berikut :

1) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Seorang pegawai yang memiliki kemampuan pengetahuan yang baik maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan

2) Keterampilan

Keterampilan merupakan suatu ilmu yang secara lahiriah ada di diri manusia, sehingga perlu dipelajari lebih mendalam untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Keterampilan dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas.

3) Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas pegawai untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaannya.

4) Pengalaman

Pengalaman merupakan peristiwa yang sudah pernah dilalui pegawai guna meningkatkan kinerja pegawai dalam

menjalankan tugas yang dibebankan kepada masing-masing pegawai.

### **2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi adalah tata cara atau sistem yang digunakan untuk membantu memproses informasi, menyimpan, dan kemudian mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi tersebut dalam bentuk multimedia yang diakomodir melalui bantuan komputer (Febrianti, 2018).

Zuliarti (2012) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi.

Menurut Ariesta F (2013) pengukuran pemanfaatannyadidasarkan pada frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi dalam arti lain pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data. Dengan adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal.

Lebih lanjut Pramudiarta R (2015) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu sumber daya manusia dalam proses akuntansi dan dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal.

### **2.1.3.2 Manfaat Teknologi Informasi**

Menurut Simarmata (2006) dalam Rival (2012) keuntungan utama teknologi informasi bahwa perusahaan sekarang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan cepat untuk semua organisasi, nasional, dan bentuk internasional.

Teknologi informasi membantu mempercepat proses penyampaian dan pemahaman informasi, khususnya dalam mengantisipasi intensitas perubahan-perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan (Riandani R, 2017).

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah (Wijayanti L, 2017)

Dari beberapa pendapat manfaat teknologi informasi diatas, penulis menyimpulkan teknologi informasi memberikan manfaat kepada perusahaan / instansi karena

terminimalisirnya kesalahan-kesalahan dalam mengolah segala data, membantu menyimpan data dengan baik.

### **2.1.3.3 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Hardyansyah (2016) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi terdiri atas :

1. Jumlah komputer yang memadai

Memiliki komputer yang memadai untuk melaksanakan tugas yang ada.

2. Pemanfaatan jaringan internet

Memiliki jaringan internet yang memadai dan dapat dimanfaatkan agar dapat mengakses informasi.

3. Proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi

Proses akuntansi dikelola menggunakan komputer sampai menjadi suatu laporan keuangan.

4. Penggunaan software sesuai dengan UU

Memiliki software pendukung untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2.1.4 Sistem Pengendalian Intern**

### **2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Pengendalian internal merupakan suatu proses komprehensif yang dipengaruhi oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai pedoman untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum (Ridwan, 2016).

Sedangkan menurut Sudirman (2016) Pengendalian internal merupakan suatu proses, yang dipengaruhi oleh sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia yang dirancang guna membantu suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dan merupakan suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya suatu organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran yang

diterapkan diintegrasikan oleh manusia, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Tujuan SPIP pada PP No.60 Tahun 2008 mengarah pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPIP, yaitu :

- 1) Kegiatan yang efektif dan efisien
- 2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan
- 3) Pengamanan aset
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem pengendalian intern yaitu untuk menciptakan kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

#### **2.1.4.3 Komponen-Komponen Pengendalian Intern**

Sedangkan dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat lima unsur dari pengendalian internal pemerintahan yaitu:



### 1) Pengendalian Lingkungan

Tindakan, Kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas.

### 2) Penilaian Resiko

Kegiatan ini diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

### 3) Kegiatan Pengendalian

Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai laporan keuangan yang obyektif.

### 4) Informasi dan Komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui informasi secara terus menerus.

#### 5) Pemantauan Pengendalian Internal

Kegiatan pengelolaan rutin supervise, perbandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, dimana evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern.

Berdasarkan kelima unsur diatas di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dijalankan guna memberikan jaminan terhadap kualitas kinerja perusahaan secara keseluruhan, sehingga dapat menciptakan akuntabilitas keuangan Negara dan tata kelola pemerintah yang baik.

#### **2.1.4.4 Indikator Sistem Pengendalian Intern**

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini mengacu pada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi(Hardyansyah, 2016) :

##### 1) Lingkungan Pengendalian

Tindakan, Kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan

komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas, yang mencakup

- a) Nilai integritas dan etika. Memelihara suasana etika organisasi, menjadi teladan untuk tindakan-tindakan yang benar. Menghilangkan godaan-godaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan menegakkan disiplin sebagaimana mestinya.
- b) Komitmen terhadap kompetensi mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah.
- c) Kepemimpinan yang kondusif pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan.
- d) Memiliki struktur organisasi kerangka kerja bagi manajemen dalam perencanaan, pengarahannya dan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi
- e) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada

## 2) Penilaian Risiko

Kegiatan ini diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Penaksiran risiko mencakup.

- a) Identifikasi risiko mengidentifikasi secara efisien dan efektif yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi
- b) Analisis risiko yaitu menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi

## 3) Kegiatan pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup:

- a) Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut dibandingkan dengan rencana sebagai tolak ukur kinerja.

- b) Pembinaan SDM
- c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d) Pengendalian fisik atas aset pimpinan instansi pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai.
- e) Pemisahan fungsi pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang.

#### 4) Informasi dan komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui informasi secara terus menerus.

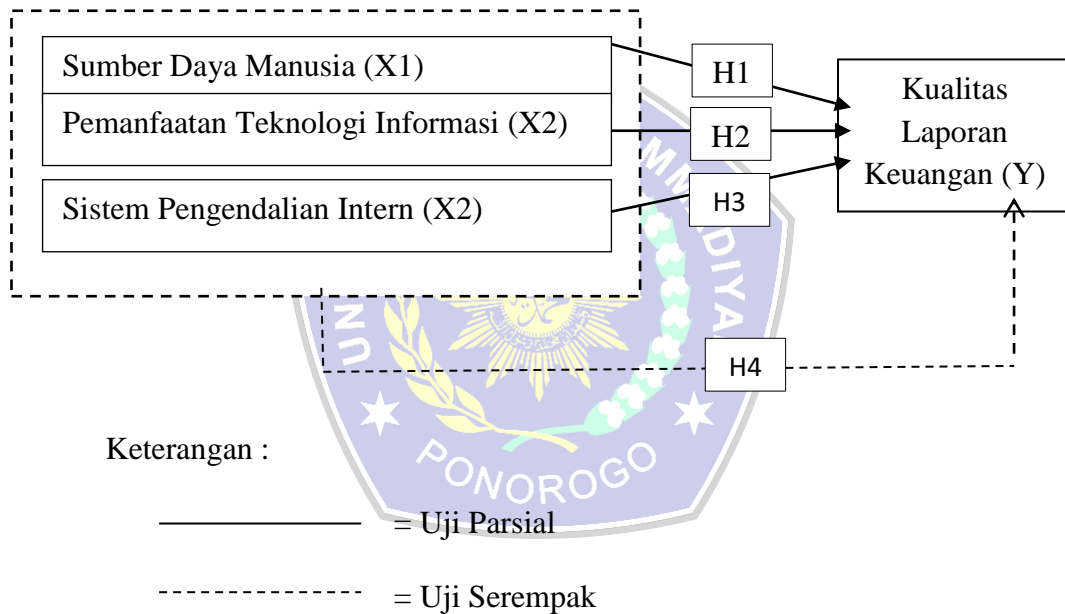
#### 5) Pemantauan

Kegiatan pengelolaan rutin supervise, perbandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, dimana evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah

atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari kajian teori, tinjauan pustaka yang menjelaskan terkait dengan Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 1**  
**Kerangka Berfikir**

Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat diuraikan bahwasumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan yang baik memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung

dengan latar pendidikan akuntansi, pendidikan maupun pelatihan yang telah diikuti, serta pengalaman dibidang keuangan (Pangestu Eka M, 2019)

Variabel pemanfaatan teknologi informasi juga akan diukur pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Teknologi informasi hubungannya sangat erat dengan keberhasilan instansi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dikarenakan teknologi informasi merupakan salah satu cara untuk menyusun laporan keuangan agar lebih cepat, akurat dan konsisten dari pada menggunakan sistem yang manual (Pangestu Eka M, 2019).

Selanjutnya variabel pengendalian intern juga akan diukur pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah (Pangestu Eka M, 2019).

## 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Riandani R (2017)	Pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatn teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan ( studi empiris pada skpd kab. Limapuluh kota)	Kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2.	Armel Gustika R (2017)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah kota dumai)	kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan
3.	(Pangestu Eka M, 2019)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo	kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan
4.	Hardyansyah (2016)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating (studi empiris pada SKPD kabupaten polewali mandar)	kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
5.	Wijayanti L (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2021



## **2.4 Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan**

Kasanudin M (2011) Sumber daya manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wijayanti L, 2017) menunjukkan tidak adanya pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Riandani R, 2017) menunjukkan adanya pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang berarti semakin tinggi kompetensi SDM yang dimiliki satker (satuan kerja) sub bagian keuangan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan mereka hasilkan sebagai petugas penyusun laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Armel Gustika R, 2017) juga menunjukkan adanya pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan karena SDM merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini

adanya kompetensi SDM mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu Eka M, 2019) menunjukkan adanya pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan karena sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian organisasi. Dalam pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis yang diajukan ialah sebagai berikut :

**H<sub>0</sub> 1 : Sumber Daya Manusia Tidak Berpengaruh Terhadap Laporan Keuangan Desa**

## **Ha1: Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Laporan Keuangan Desa**

### **2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pramudiarta R (2015) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu sumber daya manusia dalam proses akuntansi dan dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Riandani R, 2017) menunjukkan tidak adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah masih mengalami hambatan karena peralatan dan software pendukung yang masih sering mengalami kendala sehingga membutuhkan waktu perbaikan yang cukup lama dan berdampak pada jadwal waktu pelaporan yang mengalami kemunduran.

Penelitian yang dilakukan oleh (Armel Gustika R, 2017) menunjukkan adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan karena teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan,

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu Eka M, 2019) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena untuk kepentingan upload laporan akhir menggunakan teknologi informasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis yang diajukan ialah sebagai berikut :

**H<sub>0</sub>2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak Berperngaruh Terhadap Laporan Keuangan Desa**

**Ha2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berperngaruh Terhadap Laporan Keuangan Desa**

#### **2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yendrawati R, 2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena pada objek yang diteliti belum menerapkan pengendalian intern secara efektif dan menyebabkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan kurang tepat. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Armel Gustika R, 2017) karena penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan karena sistem pengendalian internal meliputi berbagai alat manajemen untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi – operasi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Riandani R, 2017) menunjukkan adanya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan karena untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kegiatan pengendalian seperti melakukan pembinaan seperti melakukan kontrol secara rutin pada lingkungan pemerintahan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu Eka M, 2019) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut menunjukkan semakin efektif sistem pengendalian intern yang ada dalam sebuah instansi/lembaga maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis yang diajukan ialah sebagai berikut :

**H<sub>0</sub>3 : Sistem Pengendalian Intern Tidak Berperngaruh Terhadap Pelaporan Keuangan Desa**

**Ha3 : Sistem Pengendalian Intern Berperngaruh Terhadap Pelaporan Keuangan Desa**

#### **2.4.4 Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam penyusunan laporan keuangan yang baik memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar pendidikan akuntansi, pendidikan maupun pelatihan yang telah diikuti, serta pengalaman dibidang keuangan. Teknologi informasi hubungannya juga sangat erat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dikarenakan teknologi informasi merupakan salah satucara untuk menyusun laporan keuangan agar lebih cepat, akurat dan konsisten dari pada

menggunakan sistem yang manual. Penyusunan laporan keuangan juga tidak terlepas dari pengendalian intern.

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan ialah sebagai berikut :

**H<sub>0</sub>4 : Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

**Ha4 : Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**



